

PETA MUTU PENDIDIKAN

JENJANG SD KABUPATEN KARANGASEM

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan
Data Rapor Mutu Tahun 2018

Oleh :
Ketut Ardana, S.Pd, M.Pd.
Ngakan Putu Suarjana, S.Pd., M.Pd.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN BALI
2019**

**PETA MUTU PENDIDIKAN
JENJANG SD KABUPATEN KARANGASEM**

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan
Data Rapor Mutu Tahun 2018

ISBN : 978-623-91297-5-0

Oleh :

Ketut Ardana, S.Pd, M.Pd.
Ngakan Putu Suarjana, S.Pd., M.Pd.

Editor :

I Made Alit Dwitama, ST, M.Pd.

Desain Sampul :

Heru Susanto

Tata Letak :

Gus Ryan

Penerbit :

LPMP BALI
Anggota IKAPI No. 018/BAI/16

Redaksi:

Jl. Letda Tantular No. 14 Niti Mandala Denpasar 80234
Telp. 0361 225666, Fax. 0361 246682
Pos-el : lpmpbali@kemdikbud.go.id
Laman : lpmpbali.kemdikbud.go.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Karangasem dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Saya menyambut baik dengan adanya peta capaian mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Karangasem, sehingga dapat dijadikan dasar oleh pemerintah Kabupaten Karangasem dalam peningkatan mutu pendidikan jenjang SD. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem, yang telah berpartisipasi dalam penyusunan peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Karangasem.
2. TPMPD Kabupaten Karangasem yang telah bekerja keras mewujudkan capaian peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Karangasem.
3. Widyaiswara LPMP Bali yang telah berkontribusi secara akademis dalam pembuatan peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Karangasem.

Peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Karangasem, dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan jenjang SD di Kabupaten Karangasem.



Kepala LPMP Bali,

I Made Alit Dwitama, S.T., M.Pd.

NIP 19741225 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	3
D. Manfaat	4

BAB II PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

A. Mutu Pendidikan	5
B. Indikator Mutu Pendidikan	7
C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan	10
D. Sumber Data Peta Capaian SNP	20
E. Kategori Capaian Pemenuhan SNP	20
F. Permasalahan dalam Penyusunan Peta Mutu Pendidikan	20
G. Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan	21

BAB III HASIL ANALISIS CAPAIAN PEMENUHAN SNP SD KABUPATEN KARANGASEM

A. Gambaran Umum Capaian Pemenuhan SNP Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018	23
B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan.....	30
C. Analisis Capaian Standar Isi.....	32
D. Analisis Capaian Standar Proses	35
E. Analisis Capaian Standar Penilaian.....	37
F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	40
G. Analisis Capaian Standar Sarana Prasarana	45
H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan	46
I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan	48

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	51
B. Rekomendasi	52

DAFTAR PUSTAKA	55
----------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.....	8
Gambar 2.2	Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	9
Gambar 2.3	Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP	10
Gambar 3.1	Grafik Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018	24
Gambar 3.2	Grafik Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018	25
Gambar 3.3	Grafik Data Responden pada Rapor Mutu Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018	26
Gambar 3.4	Capaian Rapor Mutu Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018	28
Gambar 3.5	Grafik Radar Capaian Mutu SNP Jenjang SD Kabupaten Karangasem 3 Tahun	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen	11
Tabel 2.2	Permasalahan dalam penyusunan peta mutu pendidikan	20
Tabel 2.3	Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan	22
Tabel 3.1	Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SD Kab. Karangasem Tahun 2018.....	23
Tabel 3.2	Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018.....	25
Tabel 3.3	Data Responden pada Rapor Mutu Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018.....	26
Tabel 3.4	Capaian SNP pada Level Tertentu pada Jenjang SD Kab. Karangasem Tahun 2018.....	27
Tabel 3.5	Rata-rata Capaian SNP Jenjang SD Karangasem Tahun 2018	27
Tabel 3.6	Capaian pemenuhan SNP Jenjang SD Kabupaten Karangasem 3 Tahun	29
Tabel 3.7	Capaian SKL Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018	30
Tabel 3.8	Capaian Standar Isi Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018	33
Tabel 3.9	Capaian Standar Proses Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018	35
Tabel 3.10	Capaian Standar Penilaian Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018	38
Tabel 3.11	Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018.....	40
Tabel 3.12	Capaian Standar Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018.....	45
Tabel 3.13	Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018	47
Tabel 3.14	Capaian Standar Pembiayaan Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018	49

BAB
I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diamanatkan bahwa setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu sesuai kewenangannya. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah (*whole school approach*). Sebagai langkah awal rangkaian kegiatan penjaminan mutu dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan harus mampu melakukan penyusunan peta mutu. Penyusunan peta mutu ini diperlukan agar setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mencapai dan bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Dalam konsep Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), peningkatan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat dan benar. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai *base-line* data untuk dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat, dan berkelanjutan. Sekolah/Madrasah adalah pelaku utama dalam proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Salah satu alat untuk mengkaji kemajuan peningkatan mutu sekolah secara komprehensif yang berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS sebagai salah satu komponen SPMP diharapkan dapat membangun semangat dan kultur penjaminan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Setiap sekolah mengisi EDS secara jujur untuk menunjukkan pemenuhan masing-masing standar nasional pendidikan. Instrumen yang digunakan sebagai EDS adalah instrumen pemetaan mutu pendidikan yang disiapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Hasil pemetaan mutu pendidikan tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk dapat menghasilkan peta mutu dan rekomendasi program peningkatan mutu yang tepat sebagai upaya pemenuhan 8 (delapan) SNP di tingkat sekolah. Berbagai rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pemetaan mutu pendidikan kemudian perlu dituangkan ke dalam rencana kerja sekolah. Perencanaan berupa Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) untuk jangka waktu menengah dan RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) yang merupakan jangka pendek setiap tahun. Pemetaan mutu pendidikan diverifikasi oleh Pengawas Sekolah selaku pembina sekolah tersebut. Setelah diverifikasi dilakukan agregasi dan analisis peta mutu pendidikan. Kegiatan agregasi dan analisis pemetaan mutu pendidikan dilakukan untuk mendapatkan peta tentang capaian 8 (delapan) SNP. Dari hasil analisis ini akan didapat gambaran tentang tahapan pengembangan setiap indikator dari setiap SNP untuk setiap jenjang pendidikan. Analisis ini akan menghasilkan peta mutu dan berbagai rekomendasi yang akurat dan bermanfaat bagi pemerintah kabupaten sebagai dasar perencanaan program peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten. Agregasi data pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian strategi yang dilaksanakan oleh tim penjaminan mutu pendidikan daerah/pengawas sekolah tingkat Pemerintah Daerah untuk memonitor dan mengevaluasi mutu dan keefektifan sekolah dan tenaga kependidikan berdasarkan SNP. Hasil agregasi ini menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah kabupaten/kota/provinsi sesuai kewenangannya untuk dapat dipahami dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga menjadi suatu budaya mutu di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat pusat. Hal ini sesuai dengan peran Pemerintah Daerah baik Kabupaten maupun Kota dan Provinsi dalam Sistem Pendidikan Nasional, dalam hal: (1) menyediakan pelayanan pendidikan; (2) memonitor mutu pendidikan dan pelayanan pendukung pendidikan; (3) membuat laporan mengenai mutu dan kinerja sekolah; dan (4) meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan.

Peta mutu pendidikan memaparkan peta capaian mutu SNP kabupaten/kota dan provinsi untuk setiap jenjang pendidikan. Peta capaian mutu SNP dibuat sebagai

perwujudan tugas dan wewenang LPMP Bali dalam memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Peta mutu pendidikan Kabupaten Karangasem jenjang SD ini merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) dalam menjamin pendidikan SD yang bermutu dan terstandarisasi. Penyusunan peta mutu ini mengacu pada hasil pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan tahun 2018.

B. Dasar Hukum

Peta mutu pendidikan Kabupaten Karangasem didasari oleh dasar hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tujuan

TPMPD dengan fasilitasi dari LPMP Bali melakukan analisis rapor mutu satuan pendidikan SD tahun 2018. Hasil analisis itu diwujudkan dalam bentuk Peta Mutu Pendidikan SD Kabupaten Karangasem. Tujuan penyusunan peta mutu pendidikan (capaian Standar Nasional Pendidikan) Kabupaten Karangasem jenjang SD adalah untuk:

1. Mengetahui gambaran pemenuhan standar nasional pendidikan untuk jenjang SD Kabupaten Karangasem tahun 2018.
2. Mendeskripsikan kondisi mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Karangasem tahun 2018.
3. Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Karangasem berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan tahun 2018.

4. Menyusun perencanaan peningkatan mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Karangasem dengan harapan dapat mendorong satuan pendidikan maupun pemerintah daerah mengimplementasikan SPMP dengan baik dan berkelanjutan.

D. Manfaat

Pada akhirnya nanti, analisis peta capaian mutu SNP ini diharapkan dapat menjadi *baseline* pelaksanaan SPMP sebagai elemen esensial peningkatan mutu pendidikan sehingga SPMP dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016. Secara khusus manfaat yang diharapkan dari penyusunan peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Karangasem ini adalah:

1. Sekolah dapat mengidentifikasi kelebihan serta kekurangannya dalam pemenuhan standar nasional pendidikan untuk merencanakan pengembangan ke depan. Juga mendorong sekolah melakukan refleksi terhadap upaya dan kebijakan yang telah dilaksanakan dalam pemenuhan mutu pendidikan.
2. Sekolah mampu berkoordinasi dengan segenap pemangku kepentingan dalam upaya pemenuhan mutu pendidikan menuju SNP.
3. Pemerintah daerah dapat menyusun strategi dan rencana kerja dalam meningkatkan mutu pendidikan SD di Kabupaten Karangasem. Mengacu pada hasil analisis pemenuhan mutu yang telah dilakukan, perencanaan pemerintah lebih tepat sasaran dan efektif dalam mewujudkan SD yang memenuhi atau melampaui SNP.

BAB
II

PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

A. Mutu Pendidikan

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/ upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang tangible maupun yang intangible. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, afektif dan psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah serta dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah dan manajemen kelas berfungsi untuk menyinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antar guru, siswa dan sarana pendukung di kelas.

Satori (2016) menyatakan bahwa mutu pendidikan adalah nilai dan manfaat yang sesuai dengan standar nasional pendidikan atas input, proses, output, dan outcome pendidikan yang dirasakan oleh pemakai jasa pendidikan dan pengguna hasil pendidikan. Memahami pengertian tentang mutu pendidikan selalu mengedepankan keadaan dan hasil pendidikan yang berada di masyarakat seperti Danim (2002) berpendapat bahwa kualitas pendidikan dilihat dari hasil pendidikan dianggap bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler. Di luar kerangka itu mutu keluaran juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh peserta didik selama mengikuti pendidikan. Djaali (2014) secara spesifik menyatakan bahwa ukuran mutu pendidikan adalah (1) kompetensi lulusan yang dinyatakan dengan pencapaian kompetensi dasar esensial minimal; (2)

kualitas proses pembelajaran di kelas dan proses pendidikan di sekolah. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah nilai tertinggi dari input, proses, output dan outcome pendidikan, dalam kaitannya dengan pemenuhan standar nasional pendidikan, mutu pendidikan diukur melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Berkaitan dengan pemetaan mutu, Satori (2016) menyatakan bahwa pemetaan mutu adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan peta mutu pendidikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilakukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara, pemerintah daerah, dan pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Mutu pendidikan Indonesia dinilai berdasarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan. Jadi pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas SNP dalam suatu kurun waktu yang ditentukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah untuk menghasilkan peta mutu pendidikan.

Peta mutu adalah representasi visual yang menyoroti profil mutu satuan pendidikan dalam wilayah tertentu yang menggambarkan karakteristik mutu satuan pendidikan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan. Dengan kata lain peta mutu diperoleh dari suatu proses pemetaan berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan dengan output berupa profil mutu yang di tingkat berikutnya diintegrasikan dalam batasan wilayah tertentu.

Pengumpulan data dan informasi dari profil satuan pendidikan idealnya dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai dasar pengambilan kebijakan karena pada hakikatnya sebuah peta harus dapat memberikan informasi bagi penggunanya untuk dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Sebagai sebuah media informasi peta mutu harus memiliki kemudahan bagi penggunanya, kemudahan yang dimaksud berarti adanya kejelasan informasi dan tingkat keterbacaan peta yang cukup tinggi. Untuk itu suatu peta mutu diharapkan dapat disajikan dalam tampilan yang menarik, dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif supaya tujuan pembuatan peta mutu dapat tercapai.

Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (*baseline data*) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian ke-8 SNP dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Sumber data dari penyusunan peta mutu di tiap tingkatan wilayah adalah data profil di tingkat satuan pendidikan yang memuat informasi kuantitatif dan kualitatif kondisi satuan pendidikan dalam lingkup standar nasional pendidikan. Agregasi profil satuan pendidikan di tingkat selanjutnya diharapkan dapat disusun untuk menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan untuk mendorong satuan pendidikan dalam melakukan upaya penjaminan mutu. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menyusun profil capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan adalah instrumen Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS dapat digunakan satuan pendidikan untuk mengumpulkan data entitas satuan pendidikan dan data kualitas layanan pendidikan dengan acuan SNP.

Sebuah siklus dalam konteks sistem penjaminan mutu mensyaratkan output proses pemetaan yang berupa peta mutu pendidikan dapat menjadi input bagi proses peningkatan mutu berkelanjutan. Secara operasional proses peningkatan mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal berupa program supervisi dan fasilitasi kepada satuan pendidikan. Penyusunan program supervisi dan fasilitasi dalam berbagai bentuknya dapat dilakukan apabila peta mutu yang disusun dapat digunakan sesuai kebutuhan. Untuk itu peta mutu pendidikan berbasis hasil capaian SNP hendaknya dapat dikembangkan menjadi peta dengan tema-tema tertentu yang lebih spesifik sesuai data dan informasi yang ada dalam profil satuan pendidikan. Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (*baseline* data) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Secara khusus tujuan penyusunan peta mutu dapat diturunkan dalam tingkat wilayah sebagai berikut.

1. Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan agregasi profil mutu satuan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan anggaran pendidikan di wilayah kabupaten/ kota.
2. Pemerintah provinsi dapat melakukan pemetaan mutu di daerahnya dan menggunakannya sebagai dasar dalam penyusunan peraturan daerah tentang pendidikan, perencanaan program dan penganggaran pendidikan, dan koordinasi antarkabupaten/kota dalam pelayanan pendidikan yang bermutu
3. Pemerintah dapat menggunakan profil mutu satuan pendidikan untuk menyusun peta mutu pendidikan nasional sebagai bahan penyusunan peraturan perundangundangan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengalokasian anggaran di sektor pendidikan.

Secara visual peta mutu dapat disajikan dalam berbagai bentuk diagram, carta (daftar), matriks dan narasi dari data dan informasi yang ditampilkan. Sebagai agregat dari sejumlah profil dalam satu wilayah, visualisasi komperatif dari data dan informasi antar profil menjadi suatu alternatif informasi yang dapat ditampilkan dalam peta mutu pendidikan.

B. Indikator Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah. Mutu pendidikan di sekolah cenderung tidak ada peningkatan tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh sekolah. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sendiri merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan,

PETA MUTU PENDIDIKAN

dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Bertujuan memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Sistem penjaminan mutu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikbud No. 28 Tahun 2016)

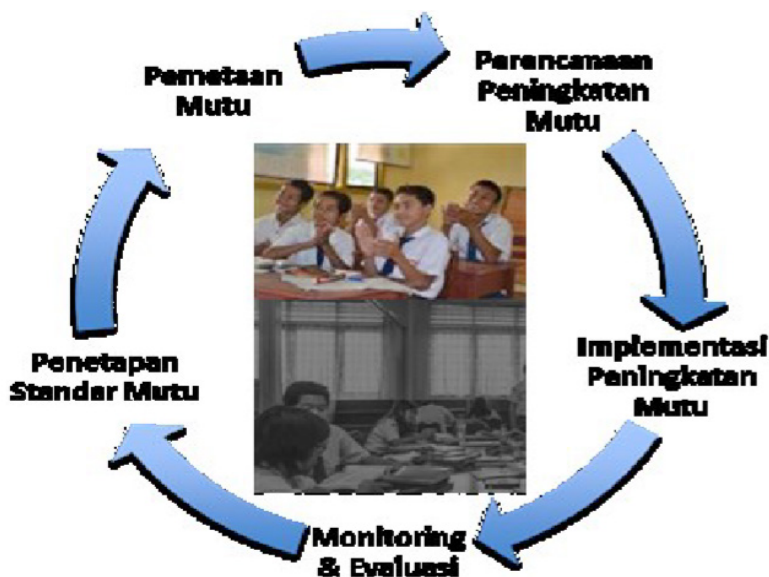
Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan, sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi, dan lembaga standarisasi pendidikan, sedangkan sistem informasi penjaminan mutu yang menunjang implementasi kedua sistem di atas.

Sistem mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing masing Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas.

1. Penetapan standar sebagai landasan dimana Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi
2. Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan
3. Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah

4. Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam program kerja maupun proses pembelajaran; dan
5. Evaluasi/audit terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan kelima siklus kegiatan dilakukan secara berkelanjutan untuk kelima siklus kegiatan dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pendidikan bermutu.

Secara lengkap kelima siklus tersebut disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 2.2 Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

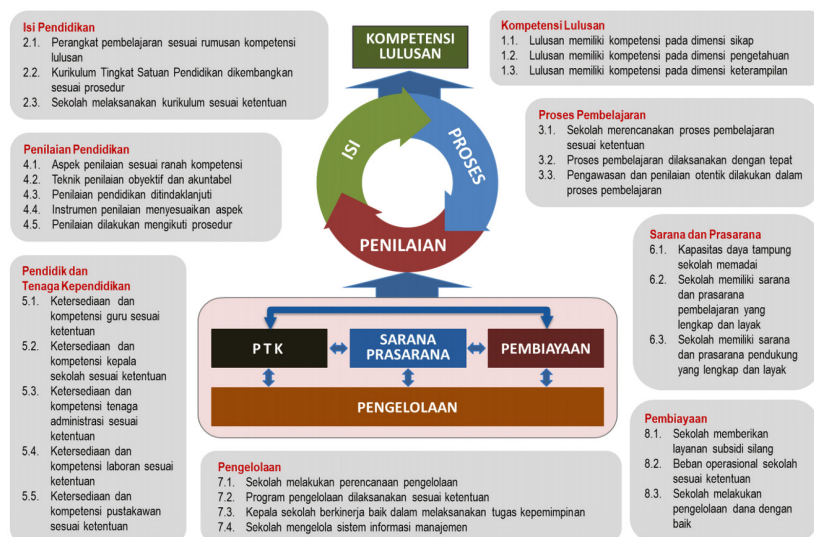
Seluruh siklus ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Sementara siklus sistem penjaminan mutu eksternal terdiri atas: (1) pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; (2) perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana strategis; (3) fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; (4) monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu; (5) penetapan dan evaluasi Standar Nasional Pendidikan; dan (6) pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan/atau program keahlian. Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga standardisasi (BSNP) dan lembaga akreditasi BAN S/M atau lembaga akreditasi mandiri sesuai kewenangan masing-masing. Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Penilaian, (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Sarana dan Prasarana, dan (8) Standar Pembiayaan.

Kedelapan standar tersebut membentuk rangkaian input, proses, dan output.

PETA MUTU PENDIDIKAN

Standar Kompetensi Lulusan merupakan output dalam rangkaian tersebut dan akan terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Standar yang menjadi input dan proses dideskripsikan dalam bentuk hubungan sebab-akibat dengan output. Standar dijabarkan dalam bentuk indikator mutu untuk mempermudah kegiatan pemetaan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan.

Secara ringkas indikator mutu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.3 Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP

C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan

Pelaksanaan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait pada satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, yang terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Sarana dan Prasarana; dan (8) Standar Pembiayaan. Pengumpulan data mutu pendidikan Tahun 2017 berdasarkan 8 SNP dilaksanakan pada pertengahan tahun melalui aplikasi PMP yang merupakan bagian dari aplikasi Dapodik. Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan yang digunakan dalam program SPMP Tahun 2018 terdiri dari 8 (delapan) SNP yang tertuang dalam 28 indikator dan 189 sub indikator, yaitu.

Tabel 2.1 Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
1	Standar Kompetensi Lulusan	1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
				1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berakhlak
				1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin
				1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun
				1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur
				1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli
				1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri
				1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab
				1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat
				1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani
		1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif
		1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif
				1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif
				1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis
				1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri
				1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif
				1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif

PETA MUTU PENDIDIKAN

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
2	Standar Isi	2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap
				2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan
				2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan
				2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa
				2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran
		2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum
				2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan
				2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan
				2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan
		2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku
				2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi
				2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal
				2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa
3	Standar Proses	3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan
				3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi
				3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis
				3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah

JENJANG SD KABUPATEN KARANGASEM

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan
				3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran
				3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu
				3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah
				3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi
				3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu
				3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
				3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif
				3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat
				3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.
				3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.
				3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa
				3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran
				3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar
				3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran
		3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif
				3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik
				3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran
				3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru
				3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran
				3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran

PETA MUTU PENDIDIKAN

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan
				4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah
		4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel
				4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap
		4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian
				4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik
		4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap
				4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan
				4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan
		4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur
				4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur
				4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4
				5.1.2.	Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang
				5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran
				5.1.4.	Bersertifikat pendidik
				5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik
				5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik
				5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik

JENJANG SD KABUPATEN KARANGASEM

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4
				5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan
				5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan
				5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara
				5.2.5.	Bersertifikat pendidik
				5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah
				5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik
				5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik
				5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik
				5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik
		5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi
				5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat
				5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat
				5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi
				5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan
				5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik
				5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik
				5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik

PETA MUTU PENDIDIKAN

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium
				5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai
				5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat
				5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai
				5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran
				5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
				5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran
				5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
				5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik
				5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik
				5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik
		5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan
				5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai
				5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat
				5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai
				5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan
				5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan
				5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik
				5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik
				5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik
				5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik
				5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik

JENJANG SD KABUPATEN KARANGASEM

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai
				6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan
		6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar
				6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar
				6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar
				6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar
				6.2.5.	Memiliki laboratorium biologi sesuai standar
				6.2.6.	Memiliki laboratorium fisika sesuai standar
				6.2.7.	Memiliki laboratorium kimia sesuai standar
				6.2.8.	Memiliki laboratorium komputer sesuai standar
				6.2.9.	Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar
				6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai
				6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai
				6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai
				6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai
				6.2.14.	Kondisi laboratorium biologi layak pakai
				6.2.15.	Kondisi laboratorium fisika layak pakai
				6.2.16.	Kondisi laboratorium kimia layak pakai
				6.2.17.	Kondisi laboratorium komputer layak pakai
				6.2.18.	Kondisi laboratorium bahasa layak pakai

PETA MUTU PENDIDIKAN

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar
				6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar
				6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar
				6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar
				6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar
				6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar
				6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar
				6.3.8.	Memiliki ruang tata usaha sesuai standar
				6.3.9.	Memiliki ruang konseling sesuai standar
				6.3.10.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar
				6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak
				6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai
				6.3.13.	Menyediakan unit kewirausahaan dan bursa kerja
				6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai
				6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai
				6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai
				6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai
				6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar
				6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai
				6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai
				6.3.21.	Kondisi ruang tata usaha layak pakai
				6.3.22.	Kondisi ruang konseling layak pakai
				6.3.23.	Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan
				7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan
				7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah

JENJANG SD KABUPATEN KARANGASEM

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap
				7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan
				7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan
				7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri
				7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan
				7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran
		7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik
				7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan
				7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik
				7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik
				7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan
				7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik
		7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan
8	Standar Pembia-yaan	8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu
				8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas
				8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu
		8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan
		8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya
				8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana
				8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan

D. Sumber Data Peta Capaian SNP

Data yang digunakan dalam pengolahan dan analisis peta capaian SNP Tahun 2018 ini diperoleh dari data yang terkumpul dan dipublikasikan secara lengkap pada bulan Juni 2019 baik data yang bersumber dari Dapodik (dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id) maupun data yang bersumber dari PMP (pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id). Capaian meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Sarana dan Prasarana, (7) Standar Pengelolaan, dan (8) Standar Pembiayaan.

E. Kategori Capaian Pemenuhan SNP

Skor capaian pemenuhan SNP berkisar antara 0 – 7. Untuk dapat mengetahui capaian pemenuhan SNP, maka dibuat pengkategorian untuk memudahkan analisis, yaitu:

1. Menuju SNP level 1 : skor $< 2,04$
2. Menuju SNP level 2 : $2,04 \leq \text{skor} < 3,70$
3. Menuju SNP level 3 : $3,70 \leq \text{skor} < 5,07$
4. Menuju SNP level 4 : $5,07 \leq \text{skor} < 6,67$
5. SNP : $6,67 \leq \text{skor} \leq 7,00$

F. Permasalahan dalam Penyusunan Peta Mutu Pendidikan

Peta Mutu Pendidikan disusun mengacu pada rapor mutu sekolah. Data pada rapor mutu bersumber dari isian instrument PMP dan data dapodik. Kualitas rapor mutu sangat ditentukan oleh kualitas isian instrumen tersebut. Kenyataannya ada berbagai persoalan yang dihadapi oleh sekolah dalam melaksanakan hal itu.

Beberapa persoalan yang dapat diinventaris sebagaiberikut:

Tabel 2.2 Permasalahan dalam penyusunan peta mutu pendidikan

No	Komponen	Permasalahan	Solusi
1	Sistem Pemetaan	<ol style="list-style-type: none">1. Pertanyaan dalam instrumen tidak reliabel2. Kesalahan dalam proses dokumentasi dalam aplikasi3. Desain responden yang salah	<ol style="list-style-type: none">1. Pertanyaan dan pernyataan instrumen mudah dipahami oleh responden2. Instrumen disesuaikan dengan kondisi responden

2	Petugas Pemetaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memberikan penjelasan mekanisme pengumpulan data 2. Tidak mendampingi proses pengisian 3. Tidak melakukan validasi terhadap hasil pengumpulan data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pemahaman yang tepat tentang instrumen PMP pada semua responden. 2. Pendampingan oleh pengawas sekolah dalam pengisian instrumen 3. Validasi hasil pengumpulan data oleh pengawas sekolah
3	Responden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jawaban instrumen berdasarkan persepsi bukan observasi 2. Pengisian dilakukan oleh orang lain 3. Proses dokumentasi dari isian manual ke dalam aplikasi tidak akurat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memilih dan menetapkan responden yang mampu dan bertanggung jawab 2. Mengisi jawaban instrumen sesuai petunjuk

G. Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan

Mengacu pada hasil rapor mutu SD Kabupaten Karangasem tahun 2018, kami melakukan verifikasi dan validasi terhadap hal tersebut. Secara lengkap hasil verifikasi dan validasi dapat dicermati pada tabel 2.3 berikut ini:

PETA MUTU PENDIDIKAN

Tabel 2.3 Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan

No	Standar	Data yang belum valid	Solusi
1	Sarana dan Prasarana	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar	Data rapor pada subindikator ini bersumber dari DAPO. Berarti tidak valid karena pengisian data di sistem dapodik sekolah tidak tepat. Solusinya memperbaiki isian data dapodik sekolah sesuai dengan kondisi riil. Juga meningkatkan pemahaman pihak sekolah dalam pengisian data dapodik sekolah terkait pemenuhan dan kondisi sarpras. Misalnya sekolah memanfaatkan ruang kelas sebagai ruang pimpinan. Sekolah menyatakan di sistem memiliki ruang pimpinan dengan catatan membuat surat/berita acara alih fungsi ruang kelas sebagai ruang pimpinan. Dengan demikian ruang kelas akan berubah fungsi menjadi ruang pimpinan. (Kelengkapan data mengenai pemenuhan dan kondisi sarana prasarana sekolah relatif kurang. Agar data valid sekolah dan pihak terkait harus membuat data lengkap mengenai pemenuhan dan kondisi sarana prasarana sekolah).
2	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Berkompetensi sosial minimal baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pemahaman tentang kompetensi sosial 2. Membentuk paradigma guru dalam mengembangkan kompetensi sosial yang lebih baik. 3. Peningkatan komitmen lembaga penjamin mutu untuk melakukan penyegaran kepada para guru.

**BAB
III**

HASIL ANALISIS CAPAIAN PEMENUHAN SNP SD KABUPATEN KARANGASEM

A. Gambaran Umum Capaian Pemenuhan SNP Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018

Pada bagian ini akan disajikan capaian pemenuhan SNP secara umum dan perbandingannya dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018. Sebelumnya juga akan dipaparkan progres pengiriman data baik pada data PMP maupun Dapodik tahun 2018 sebagai dasar analisis rapor mutu daerah.

1. Progres Pengiriman Data pada Dapodik Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018

Tabel 3.1 Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SD Kab. Karangasem Tahun 2018

No	Kecamatan	Total %	Total Sekolah	Kirim	Sisa
1	Kubu	100%	51	51	0
2	Abang	100%	59	59	0
3	Karangasem	100%	66	66	0
4	Bebandem	100%	39	39	0
5	Manggis	100%	45	45	0
6	Selat	100%	34	34	0
7	Sidemen	100%	29	29	0
8	Rendang	100%	33	33	0
Jumlah			356	356	0

Sumber: <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/>
(diunduh tanggal 13-062019; 20:20)

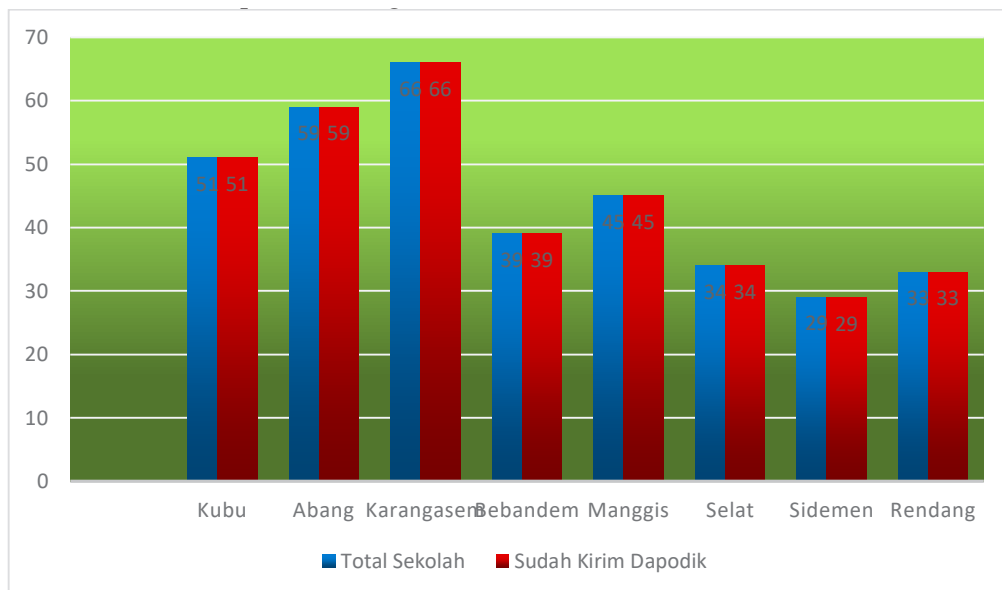
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah SD di Kabupaten Karangasem sebanyak 356 sekolah. Sampai batas waktu pengambilan data pada laman

Dapodik tersebut ada 356 sekolah yang sudah mengirimkan datanya.

Sedangkan progres pengiriman data pada tingkat Provinsi Bali ada pada urutan ke 6. Data jumlah sekolah ini menunjukkan banyaknya sekolah yang telah mengirimkan data Dapodik sampai batas waktu penutupan pengiriman data Dapodik.

Data pengiriman dapodik Jenjang SD Kabupaten Karangasem di atas juga kami sajikan pada grafik berikut ini.

**Gambar 3.1 Grafik Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SD
Kabupaten Karangasem Tahun 2018**



Berdasarkan data di atas diketahui bahwa SD di Kabupaten Karangasem tahun 2018 yang terdaftar di sistem dapodik sebanyak 356 sekolah. Satu sekolah yaitu SD Saraswati Amlapura tidak terdaftar karena sejak 2018 sudah tidak mengisi data di sistem dapodik. Hal itu terjadi karena sekolah sudah tidak memiliki siswa sehingga tidak beroperasi.

Data ini diberikan disajikan agar dalam analisis data mutu, Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) Kabupaten Karangasem tidak menemukan perbedaan jumlah sekolah yang mencapai level tertentu pada standar yang berbeda.

2. Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018

Untuk mengetahui jumlah sekolah jenjang SD Kabupaten Karangasem yang sudah mengirimkan data PMP tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

JENJANG SD KABUPATEN KARANGASEM

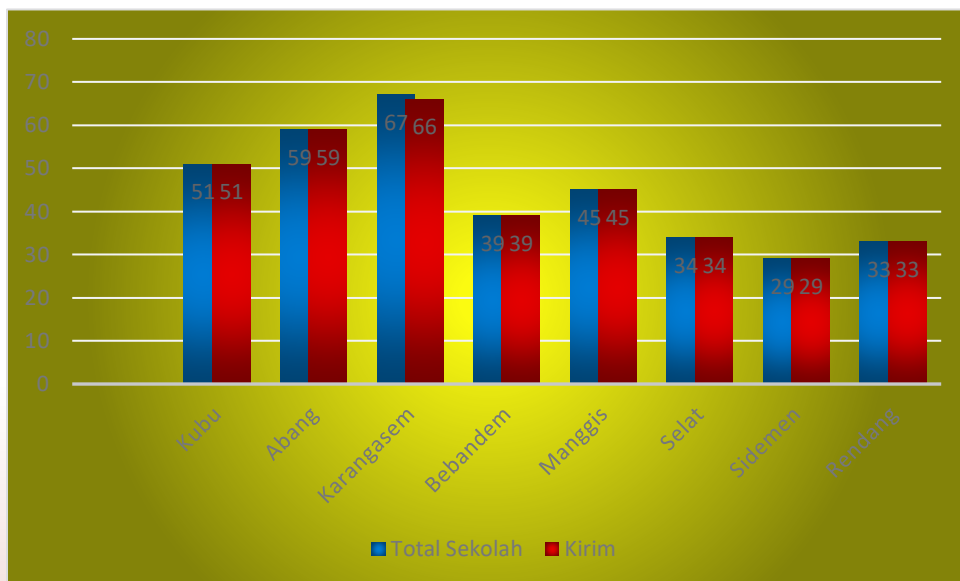
Tabel 3.2 Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018

No.	Kecamatan	Total %	Total Sekolah	Kirim	Sisa
1	Kubu	100,00 %	51	51	0
2	Abang	100,00 %	59	59	0
3	Karangasem	98,51%	67	66	1
4	Bebandem	100,00 %	39	39	0
5	Manggis	100,00 %	45	45	0
6	Selat	100,00 %	34	34	0
7	Sidemen	100,00 %	29	29	0
8	Rendang	100,00 %	33	33	0
Jumlah			357	356	1

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/>

(diunduh tanggal 13-06-2019; 20:20)

Gambar 3.2 Grafik Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018



Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah SD di Kabupaten Karangasem tahun 2018 dalam sistem PMP sebanyak 357 sekolah. SD yang telah mengirimkan data PMP sebanyak 356 sekolah. Sampai batas waktu pengambilan data pada laman PMP tersebut ada 356 sekolah sudah mengirimkan datanyadan masih ada 1 sekolah yang belum mengirimkan data yaitu SD Saraswati Amlapura. Terjadi perbedaan data sekolah antara sistem PMP dan sistem Dapodik.

Yang mana SD Saraswati Amlapura tidak terdaftar di sistem dapodik namun masih terdaftar pada sistem PMP. Dengan diketahuinya perbedaan data ini, maka dalam analisis capaian rapor mutu tidak akan membingungkan TPMPD Kabupaten Karangasem.

3. Gambaran Umum Capaian Pemenuhan SNP SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018

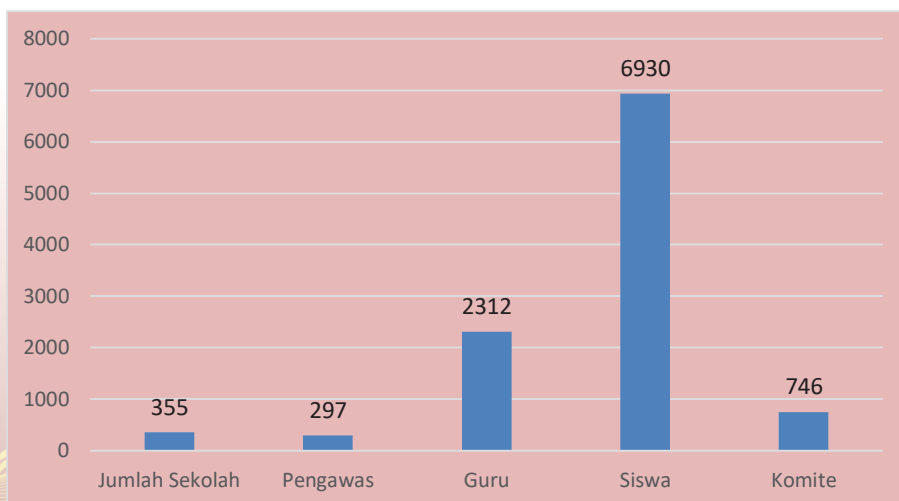
Tampilan rapor mutu Tahun 2018 lebih komunikatif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada rapor mutu tahun 2018 dapat menunjukkan banyak sekolah serta data sekolah yang telah mencapai level tertentu pada setiap standar pada tingkat kabupaten. Angka yang menunjukkan jumlah sekolah yang mencapai level tertentu di-klik akan muncul nama-nama sekolah tersebut. Dengan demikian daerah akan mudah melakukan intervensi terhadap sekolah tersebut pada masing-masing standar. Berikut adalah capaian SNP jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018. Adapun respondennya adalah:

**Tabel 3.3 Data Responden pada Rapor Mutu Jenjang SD
Kabupaten Karangasem Tahun 2018**

No	Responden	Jumlah
1.	Jumlah Sekolah	355
2.	Pengawas	297
3.	Guru	2312
4.	Siswa	6930
5.	Komite	746

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

**Gambar 3.3 Grafik Data Responden pada Rapor Mutu Jenjang SD
Kabupaten Karangasem Tahun 2018**



Berdasarkan tabel dan gambar di atas, data SD yang mengisi instrumen data PMP 2018 dapat diketahui bahwa ada satu sekolah yang belum muncul rapor mutunya. Banyak sekolah yang mengirim data PMP sebanyak 357 sekolah sedangkan yang muncul sebanyak 356 sekolah. Adapun capaian pemenuhan SNP SD Kabupaten Karangasem tahun 2018 adalah berikut.

Tabel 3.4 Capaian SNP pada level tertentu pada jenjang Jenjang SD
Kab. Karangasem Tahun 2018

No	Standar/Indikator/Sub	Capaian 2018		Kinerja	Sasaran				
		Nilai	Kategori		M1	M2	M3	M4	SNP
1.	Standar Kompetensi Lulusan	6,20	★★★★		1	0	1	297	56
2.	Standar Isi	5,95	★★★★		1	0	3	351	0
3.	Standar Proses	6,64	★★★★		0	1	0	167	187
4.	Standar Penilaian Pendidikan	6,17	★★★★		0	1	13	294	46
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4,39	★★★		0	29	313	13	0
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3,85	★★★		2	70	283	0	0
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	6,05	★★★★		1	1	9	344	0
8.	Standar Pembiayaan	6,01	★★★★		0	1	12	338	4

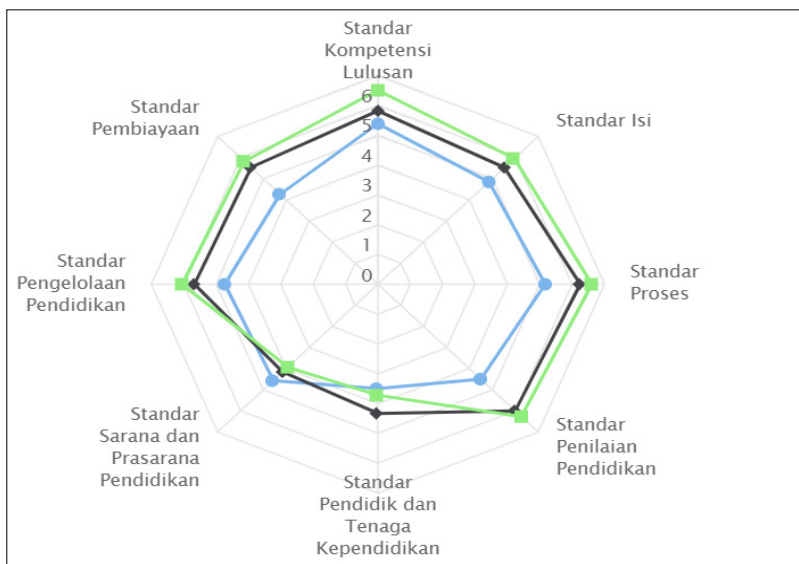
Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Tabel 3.5 Rata-rata capaian SNP Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018

STANDAR	SKOR RATA-RATA	KETERANGAN
SKL	6,20	Menuju SNP 4
ISI	5,95	Menuju SNP 4
PROSES	6,64	Menuju SNP 4
PENILAIAN	6,17	Menuju SNP 4
PTK	4,39	Menuju SNP 3
SARPRAS	3,85	Menuju SNP 3
PENGELOLAAN	6,05	Menuju SNP 4
PEMBIAYAAN	6,01	Menuju SNP 4

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Gambar 3.4 Capaian Rapor Mutu Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018



Berdasarkan Tabel 3.5 dapat dijelaskan bahwa kolom nilai adalah besarnya capaian nilai standar yang diperoleh yang didapat dari rata-rata nilai indikatornya. Sedangkan rata-rata nilai indikatornya didapat dari rata-rata sub indikatornya. Kolom katagori adalah level capaian masing-masing sekolah pada standar mulai bintang 1 sampai bintang 5, sesuai kriteria nilai yang sudah dibuatkan intervalnya. Kolom kinerja adalah capaian peningkatan/penurunan hasil SNP dari tahun sebelumnya. Dari tampilan garis pendek tersebut yang terlihat menurun adalah pada standar sarpras. Kolom sasaran menunjukkan banyaknya sekolah yang berada pada level tertentu.

Pemenuhan SKL ada sebanyak 56 sekolah yang sudah mencapai SNP, 297 sekolah yang berada pada level menuju SNP 4, dan masing-masing 1 sekolah berada pada level M1 dan M3. Data pada tabel 3.5 selanjutnya menunjukkan bahwa pada 4 standar yaitu SKL, proses, penilaian dan pembiayaan sudah mencapai SNP. Tetapi untuk 4 standar yaitu; standard Isi, PTK, sarana prasarana dan pengelolaan belum ada yang mencapai SNP. Temuan menarik dari tabel tersebut adalah pemenuhan Standar Proses, SKL dan Standar Penilaian pada katagori menuju SNP 4 dan sudah ada memenuhi SNP. Capaian tersebut bertolak belakang dengan pemenuhan pada Standar PTK serta Standar Sarana dan Prasarana yang masih dominan pada katagori menuju SNP 3. Ini menunjukkan kinerja dan komitmen tinggi guru dan kepala sekolah SD Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan data pada Gambar 3.4 dapat dijelaskan bahwa sekolah yang berada pada level menuju SNP 1 tidak ada. Pada Tahun 2016 ada 19 sekolah, pada Tahun 2017 ada 8 sekolah dan pada Tahun 2018 sudah tidak ada sekolah yang berada pada level ini. Ini menunjukkan bahwa sekolah semakin mampu dalam meningkatkan level standarnya. Hal ini berarti upaya-upaya yang dilakukan sekolah berhasil meningkatkan pemenuhan SNP. Begitu pula pada level menuju SNP 2 dan menuju SNP 3 semuanya

mengalami penurunan jumlah. Sedangkan pada level menuju SNP 4, sudah pasti mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 ada 53 sekolah, pada Tahun 2017 meningkat menjadi 303 sekolah sedangkan pada Tahun 2018 meningkat menjadi sebanyak 349 sekolah.

Capaian pemenuhan SNP untuk masing-masing standar dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

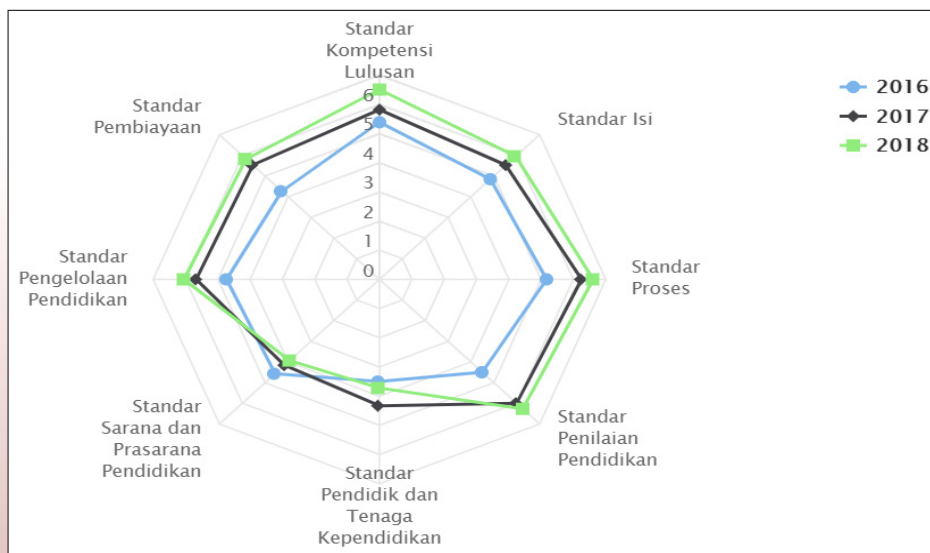
Tabel 3.6 Capaian pemenuhan SNP Jenjang SD Kabupaten Karangasem 3 Tahun

NO	SNP	2016	2017	2018
1	Standar Kompetensi Lulusan	5,53	5,92	6,2
2	Standar Isi	4,80	5,61	5,95
3	Standar Proses	5,33	6,42	6,64
4	Standar Penilaian Pendidikan	4,52	5,96	6,17
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,77	4,31	4,39
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4,65	4,03	3,85
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4,88	5,76	6,05
8	Standar Pembiayaan	4,26	5,78	6,01

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa capaian tiap standar ke tujuh dari delapan standar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hanya standar sarana prasarana yang mengalami sedikit penurunan. Untuk lebih mudah melihatnya dapat dilihat pada grafik radar berikut.

Gambar 3.5 Grafik Radar Capaian Mutu SNP Jenjang SD Karangasem 3 Tahun



Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Grafik radar menunjukkan bahwa pada standar sarana-prasarana terjadi persilangan garis sedangkan pada standar yang lain tidak terjadi perpotongan. Hal ini menunjukkan adanya penurunan nilai mutu pada standar tersebut. Untuk melihat penurunan dan penyebabnya akan dibahas dalam analisis setiap standar. Analisis capaian pemenuhan masing-masing standar dilakukan untuk mencari solusi pemecahan masalah dan memunculkan rekomendasi yang dijadikan dasara pengembangan program perencanaan pemenuhan mutu pada tahun berikutnya.

B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan

Hasil pada capaian pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang diamati pada rapor mutu SD Kabupaten Karangasem 2018 dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Capaian SKL Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018

1	Standar Kompetensi Lulusan	6.20
1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6.96
1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME	6.96
1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berakhlak	6.98
1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin	6.98
1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun	6.98
1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur	6.97
1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli	6.97
1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri	6.91
1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab	6.97
1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat	6.85
1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani	6.99
1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	4.32
1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	4.32
1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6.39
1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif	6.00
1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif	5.87
1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis	6.54
1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri	6.55
1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif	6.88
1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif	6.51

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Capaian SKL pada rapor mutu SD Kabupaten Karangasem tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-ratanya sebesar 6,20. Dari ketiga indikator SKL yaitu sikap,

pengetahuan dan keterampilan nilai yang paling rendah adalah 4,32 pada pengetahuan. Indikator pengetahuan ini hanya memiliki satu sub indikator yaitu indikator 1.2.1 Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif. Dengan demikian penyebab rendahnya hanyalah dari sub indikator 1.2.1. Untuk mengetahui dari mana asal data tersebut, perlu ditelusuri asal data dengan membuka tabel konversi excel.

Pada tabel konversi excel ditemukan bahwa data 1.2.1 berasal dari data DAPO dan PMP. Data yang diinput melalui aplikasi dapodik adalah data:

1. Rata-rata nilai rapor siswa kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk setiap mata pelajaran
2. Rata-rata hasil UN untuk 3 mapel yang diujikan
3. Tingkat kelulusan siswa kelas 6.

Data pada indikator 1.2.1 yang diperoleh dari pengisian instrumen PMP dapat dilihat pada perangkat instrumen PMP untuk jenjang SD Kabupaten Karangasem. Setelah dilakukan analisis atas pertanyaan dan kode sub indikator didapat bahwa pertanyaan untuk 1.2.1 adalah pertanyaan A7 (pada komponen A yaitu komponen hasil belajar dan nomor butir ke-7).

Pertanyaan ini terdapat pada responden kepala sekolah dan pengawas.

Adapun pertanyaannya adalah:

Petunjuk untuk nomor 7 - 9,

Arti angka 1 tidak ada; 2 1-5 penghargaan/tahun; 3 6-10 penghargaan/tahun; 4 > 10 penghargaan/tahun

7. Prestasi siswa/kelompok di sekolah anda atas pengetahuan yang dimiliki

No	Tingkat	Frekuensi			
1	Tingkat Kabupaten	1	2	3	4
2	Tingkat Propinsi	1	2	3	4
3	Tingkat Nasional	1	2	3	4
4	Tingkat Internasional	1	2	3	4

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 7)

Satu nomor pertanyaan dijawab empat butir pertanyaan yang menanyakan prestasi siswa/kelompok atas pengetahuan yang dimiliki oleh sekolah. Sesuai kriteria jika mereka tidak mendapat penghargaan maka mereka pilih angka satu baik pada tingkat kabupaten/provinsi/nasional/internasional, jika mendapat satu sampai dengan lima penghargaan mereka bisa pilih angka dan seterusnya.

Sekolah hendaknya mengisi dengan memperhatikan bukti fisik yang ada. Adapun deskripsi dan bukti fisik yang harus diperhatikan pada sub indikator 1.2.1 ini dapat dilihat pada panduan teknis pengisian instrumen (halaman 99) sebagai berikut:

7. Sekolah menunjukkan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh kelompok/ individu siswa untuk mengukur tingkat pengetahuan yang dimiliki siswa sebagai hasil pengalaman pembelajaran dan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah selama satu tahun terakhir.

Diisi mengacu pada:

- a) Piagam penghargaan dalam bentuk piala, plakat atau sertifikat yang dimiliki sekolah pada tahun berjalan.
- b) Diskusi dengan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah dan siswa.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 104)

Sekolah hendaknya mengisi butir pertanyaan ini dengan jujur untuk memudahkan mereka menentukan target keberhasilan pada program peningkatan berikutnya. Karena dari capaian pengetahuan yang diperoleh tahun ini akan digunakan untuk meningkatkan prestasi pada tahun-tahun berikutnya. Jika prestasi pengetahuan yang diinput sekarang tidak benar maka perencanaan yang dibuat juga tidak akan sesuai.

Setelah mencermati paket instrumen sesuai jenjang, langkah selanjutnya adalah mencermati buku indikator. Pada kode 1.2.1 akan dapat dilihat deskripsi sub indikator untuk siswa jenjang SD serta penyebab tidak tercapainya standar mutu. Adapun penyebab tidak tercapainya pemenuhan SKL SD Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi dan latar belakang pendidikan guru tidak selaras dengan mata pelajaran yang diampu.
2. Guru belum memiliki kompetensi yang sesuai standar dan tidak tersertifikasi sebagai pendidik.
3. Alokasi waktu dan beban belajar memberatkan pada sisi siswa.
4. Gaya dan metode pembelajaran yang diterapkan tidak mengarah pada bakat, minat dan kemampuan belajar siswa.
5. Ketersediaan dan kondisi sarana prasarana belum memadai, dan lainnya. Dengan memperhatikan buku indikator mutu yaitu pada penyebab tidak tercapainya standar mutu dapat diketahui masalah dan akar masalah, sehingga akan mudah membuat rekomendasi dan program pada perencanaan mutu. Adapun pilihan rekomendasi yang dapat diajukan daerah adalah:
 1. Perlu membuat program penyesuaian kualifikasi guru dengan mata pelajaran yang diampu.
 2. Perlu diberikan pelatihan peningkatan kompetensi pada mata pelajaran yang diampu.
 3. Perlu menerapkan pengaturan beban belajar antara tatap muka dan penugasan di sekolah, sehingga tidak memberatkan siswa.
 4. Perlu diberikan pelatihan terkait dengan gaya dan metode pembelajaran yang mengarah pada pengembangan bakat, minat dan kemampuan belajar siswa.
 5. Perlu melengkapi sarana-prasarana pembelajaran yang lebih memadai.

C. Analisis Capaian Standar Isi

Analisis berikutnya adalah capaian pada standar isi. Seperti pada analisis SKL langkah yang dilakukan adalah mencermati rapor mutu pada standar isi, terutama capaian yang paling rendah karena akan menjadi prioritas penanganan. Setelah itu menelusuri asal data dengan membuka file tabel konversi, selanjutnya membuka paket instrumen dan pedoman teknisnya serta mencermati buku indikator mutu untuk membuat rekomendasi. Adapun capaian rapor mutu pada standar isi adalah:

Tabel 3.8 Capaian Standar Isi Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018

Standar Isi	5,95
Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	6,11
Memuat karakteristik kompetensi sikap	5,93
Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan	6,44
Memuat karakteristik kompetensi keterampilan	6,19
Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa	6,02
Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran	5,97
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	5,96
Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum	5,29
Mengacu pada kerangka dasar penyusunan	6,98
Melewati tahapan operasional pengembangan	5,01
Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan	6,54
Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5,77
Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku	7
Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi	2,83
Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal	6,77
Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa	6,5

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 3 indikator pada standar isi, capaian yang paling rendah adalah indikator 2.3. Penyebab rendahnya nilai indikator itu adalah capaian terendah dari sub indikatornya yaitu pada sub indikator 2.3.2 . Setelah ditelusuri datanya pada tabel konversi didapat bahwa terdapat 8 butir pertanyaan pada sub indikator 2.1.5 yaitu pada pertanyaan B. Isi pendidikan pada butir nomor 7, yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Adapun butir pertanyaannya sebagai berikut:

7. Kesesuaian tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi dalam mata pelajaran di sekolah anda
Petunjuk arti angka adalah 1 tidak ada; 2 < 50%; 3 antara 51-85%; 4 > 85%

No	Mata Pelajaran	Tingkat kompetensi				Ruang Lingkup Materi			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	1	2	3	4	1	2	3	4
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	1	2	3	4	1	2	3	4
3	Bahasa Indonesia	1	2	3	4	1	2	3	4
4	Matematika	1	2	3	4	1	2	3	4
5	Ilmu Pengetahuan Alam	1	2	3	4	1	2	3	4
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	1	2	3	4	1	2	3	4
7	Bahasa Inggris	1	2	3	4	1	2	3	4
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	1	2	3	4	1	2	3	4

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 12)

Berdasarkan kutipan dari instrumen dapat dijelaskan bahwa kesesuaian ruang lingkup materi untuk 8 mata pelajaran yang dipilih akan menentukan capaian hasil SNP nya. Untuk bisa menentukan apakah guru memperoleh skor 1, 2, 3 atau 4 maka bukti fisik mengacu pada kolom berikut.

7. Perangkat pembelajaran dikembangkan untuk semua mata pelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi pembelajaran. Guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu.

Diisi mengacu pada:

- a) Perangkat pembelajaran semua mata pelajaran.
- b) Buku yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran.
- c) Silabus dan RPP Guru mata pelajaran pada semua tingkat dan kelas.
- d) Telaah kesesuaian perangkat pembelajaran dengan tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)

Hal terpenting yang harus dilihat saat pengisian adalah bahwa guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu. Bukti fisiknya adalah bahwa silabus dan RPP guru mata pelajaran pada semua tingkat dan kelas. Jika guru memberi skor 4 berarti riilnya guru telah memiliki silabus dan RPP yang lengkap paling tidak di atas 85% dari semua RPP yang mereka harus buat. Misalnya ada 20 RPP untuk matematika, maka guru matematika tersebut minimal telah membuat 18 RPP yang sudah sesuai ruang lingkup materinya. Jika dari 18 RPP yang dibuat hanya 10 yang baru sesuai ruang lingkup materinya, maka guru tersebut harus memberi skor 3. Terlebih lagi jika guru tidak membuat RPP atau hanya membuat RPP hanya 2 buah, maka guru tersebut harus memberi skor pada butir tersebut 2. Langkah selanjutnya adalah mencermati indikator mutu pada butir 2.1.5. Deskripsi dari sub indikator 2.1.5 adalah :

1. Menyesuaikan dengan perkembangan siswa pada jenjang SD yaitu pada konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
2. Menyesuaikan dengan yang dipelajari pada jenjang pendidikan dan sumber lain secara mandiri.
3. Menyesuaikan dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan

Resiko jika standar mutu tersebut tidak dicapai adalah :

1. Materi pembelajaran sulit dicerna oleh siswa.
2. Lingkup pembelajaran yang diterima siswa tidak berkembang antar jenjang pendidikan.

Ketidaktercapaian standar mutu tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Kompetensi guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran kurang.
2. Sekolah belum memperhatikan perkembangan psikologis anak, lingkup dan kedalaman, kesinambungan, fungsi sekolah dan lingkungan siswa.

Dari resiko dan penyebab tersebut dapat dibuat rekomendasi pemenuhan mutu sebagai prioritas adalah:

1. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran (misalnya pelatihan, pendampingan, supervisi, studi banding, belajar mandiri, lesson study, dan sebagainya).

2. Guru perlu mengembangkan pembelajaran yang memperhatikan perkembangan psikologi dan karakteristik peserta didik serta mata pelajaran. Pembelajaran yang demikian dapat dilaksanakan jika guru mampu merancang program pembelajaran yang memperhatikan psikologis anak, lingkup dan kedalaman, kesinambungan serta fungsi dan lingkungan siswa.

D. Analisis Capaian Standar Proses

Berikut adalah capaian setiap sub indikator pada standar proses pada rapor mutu SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018.

Tabel 3.9 Capaian Standar Proses Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018

3.	Standar Proses	6,64	★★★★		0	1	0	167	187
3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6,83	★★★★		0	0	0	42	312
3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan	6,94	★★★★		0	0	2	8	344
3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi	6,94	★★★★		0	0	2	13	339
3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis	6,51	★★★★		0	0	1	204	149
3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah	6,91	★★★★		0	0	1	29	324
3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6,68	★★★★		0	0	0	137	218
3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan	6,85	★★★★		0	0	1	51	303
3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran	6,86	★★★★		0	0	0	55	300
3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu	6,70	★★★★		0	0	1	128	226
3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah	6,70	★★★★		0	0	1	120	234
3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi	6,84	★★★★		0	0	0	57	298
3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu	6,83	★★★★		0	0	0	62	293
3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi	6,66	★★★★		0	0	1	145	209
3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif	6,64	★★★★		0	0	1	152	202
3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat	6,89	★★★★		0	0	0	33	322
3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas	6,85	★★★★		0	0	0	58	297
3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa	6,87	★★★★		0	0	0	45	310
3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa	6,10	★★★★		0	0	13	277	65
3.2.13.	Memfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran	5,43	★★★★		0	4	118	189	44
3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar	6,44	★★★★		0	0	2	218	135
3.2.15.	Mengelola kelas saat menurut pembelajaran	6,91	★★★★		0	0	0	28	327

PETA MUTU PENDIDIKAN

3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	6,41	****		0	2	3	223	126
3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif	5,92	****		0	17	51	165	121
3.3.2.	Memfaatkan hasil penilaian otentik	6,73	****		0	1	5	81	267
3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran	6,64	****		0	0	4	126	224
3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru	6,05	****		0	1	12	280	61
3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran	6,39	****		0	1	7	263	83
3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran	6,73	****		1	2	5	64	282

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 3 indikator yang terdapat dalam standar proses, capaian pada indikator 3.3 yang paling rendah. Dari 6 sub indikatornya ada 2 capaian terendah yaitu 3.3.1 dan 3.3.4. Capaian yang paling rendah adalah 3.3.1. Data sub indikator 3.3.1 didapat dari 3 butir pertanyaan pada instrumen komponen C (proses pendidikan) nomor butir 14 yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru.

Butir pertanyaan adalah sebagai berikut:

14. Aspek dan perangkat penilaian otentik yang digunakan guru di sekolah anda

No	Aspek	Angket	Observasi	Catatan Anekdot	Refleksi
1	Kesiapan siswa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Proses belajar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Hasil belajar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sumber: *Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 18)*

Pertanyaan ini bertujuan untuk menanyakan apakah guru dalam proses pembelajaran melakukan penilaian pendahuluan terhadap siswa baik pada kesiapan belajarnya (sebelum pembelajaran), proses belajar (selama pembelajaran) dan hasil belajar (setelah pembelajaran). Jika guru melakukan ketiga hal tersebut, berarti guru sudah melaksanakan penilaian secara otentik. Guru dapat memilih jenis penilaian yang digunakan. Untuk melihat bukti fisik yang diacu, dapat melihat pedoman teknis pengisian instrumen sesuai nomor butir pertanyaannya, seperti berikut ini.

14. Penilaian otentik menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada aspek sikap. Guru dalam proses pembelajaran melakukan penilaian otentik secara komprehensif, baik di kelas, bengkel kerja, laboratorium, maupun tempat praktik kerja, dengan menggunakan: angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi.

Diisi mengacu pada:

- a) Dokumen instrumen penilaian otentik,
- b) Observasi pelaksanaan penilaian otentik,
- c) Hasil penilaian otentik;
- d) Diskusi dengan guru

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 117)

Penilaian otentik ini muncul pada standar proses. Hal ini bisa dijelaskan bahwa sesuai pedoman teknis di atas bahwa keterpaduan kesiapan siswa, proses dan hasil belajar secara utuh akan menggambarkan kapasitas, gaya dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan sikap. Jadi dengan melakukan penilaian otentik secara komprehensif akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah/pengawas/guru dapat menentukan jawaban dari bukti fisik yang mereka miliki seperti dokumen instrumen penilaian otentik, observasi pelaksanaan otentik, hasil penilaian dan diskusi dengan guru. Ketidaktercapaian standar mutu pada sub indikator 3.3.1. akan berdampak pada hal-hal sebagai berikut:

1. Guru kesulitan dalam memperbaiki proses pembelajaran.
2. Siswa tidak memiliki dorongan untuk mencapai aspek pengetahuan dan keterampilan.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut adalah karena guru belum memahami prosedur penilaian otentik dengan baik serta guru belum mampu mengidentifikasi instrumen yang dapat digunakan sebagai penilaian otentik. Dengan mencermati resiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu pada 3.3.1 maka dapat dibuatkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam memahami penilaian otentik dengan baik.
2. Perlu diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mengidentifikasi instrumen penilaian sehingga dapat memilih dan mengembangkan instrumen penilaian otentik.

E. Analisis Capaian Standar Penilaian

Capaian pemenuhan standar penilaian SD Kabupaten Karangasem tahun 2018 selengkapya dapat dicermati pada tabel berikut ini.

PETA MUTU PENDIDIKAN

Tabel 3.10 Capaian Standar Penilaian Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018

4 Standar Penilaian Pendidikan		6,17
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6,54
4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan	6,69
4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah	6,38
4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	6,06
4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel	6,27
4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap	5,84
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6,7
4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian	6,79
4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik	6,6
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	5,96
4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap	5,85
4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan	6,3
4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan	5,72
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5,59
4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur	6,68
4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur	6,33
4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai	3,77

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 5 indikator pada standar penilaian ini yang memiliki nilai terendah adalah pada indikator ke-5 dan nilai terendah sub indikatornya adalah 4.5.3. Hasil penelusuran data pada sub indikator 4.5.3 diperoleh informasi bahwa terdapat 40 butir pertanyaan dari perangkat instrumen PMP yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut:

12. Pertimbangan cara hitung penilaian pendidikan di sekolah anda.

No	Mata Pelajaran	Penilaian Hasil Belajar					Kelulusan				
		Ulangan	Pengamatan	Penugasan	Penilaian Lain	Total	Ujian Sekolah	Penilaian Sikap	Penilaian Pengetahuan	Penilaian Keterampilan	Total
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
3	Bahasa Indonesia	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
4	Matematika	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
5	Ilmu Pengetahuan Alam	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
7	Bahasa Inggris	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
8	Seni Budaya	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
9	Prakarya	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
10	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 108)

Pertanyaan untuk sub indikator 4.5.3 adalah terletak pada pernyataan yang diberi kotak yaitu pada komponen kelulusan. Pada komponen tersebut ada 4 kolom yang isinya masing-masing adalah ujian sekolah, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sedangkan jumlah mata pelajaran ada 10, sehingga banyaknya isian sebanyak 4×10 yaitu 40 butir pertanyaan. Persentase yang diisi pada kolom komponen tersebut harus berjumlah 100% sesuai nilai yang sudah ditulis pada total. Guru hanya mengisi sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ampu. Untuk menentukan cara menjawab dari responden dapat dilihat pada pedoman teknis instrumen sebagai berikut:

12. Guru mempertimbangkan penilaian hasil belajar siswa dalam bentuk:

- Ulangan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar Siswa.
- Pengamatan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indra, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator hasil belajar yang diamati.
- Penugasan dengan memberikan tugas yang dikerjakan siswa secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.
- Bentuk penilaian lain dapat berupa jurnal, portofolio, dan penilaian proyek.

Sekolah mempertimbangkan penentuan kelulusan siswa berdasarkan:

- Ujian sekolah.
- Penilaian sikap.
- Penilaian pengetahuan.
- Penilaian keterampilan.

Guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu.

Diisi mengacu pada:

- a) Dokumen pelaksanaan dan hasil ulangan, pengamatan, penugasan dan bentuk lain.
- b) Dokumen pelaksanaan dan hasil ulangan, UAS, UUK, UKK.
- c) Diskusi dengan guru dan siswa.
- d) Pedoman ketentuan kelulusan.
- e) Notulen rapat penentuan kelulusan.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 108)

Setelah memahami dari mana asal data tersebut, langkah selanjutnya mencermati indikator mutu untuk melihat resiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut, agar nanti dapat dibuatkan rekomendasinya. Adapun pernyataanya adalah sebagai berikut:

PETA MUTU PENDIDIKAN

Sub-Indikator 3. Kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai

Deskripsi:

- ❖ Kenaikan kelas dan kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik.
- ❖ Pertimbangan penentuan kelulusan siswa:
 - Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
 - Ujian sekolah.
 - Ujian sekolah berstandar nasional.
 - Penilaian sikap.
 - Penilaian pengetahuan.
 - Penilaian keterampilan.

Resiko jika standar mutu tersebut tidak tercapai adalah:

1. Pengukuran pencapaian kompetensi siswa tidak dapat diketahui dengan tepat.
2. Ketidakadilan bagi siswa yang berkebutuhan khusus dan memiliki perbedaan latar belakang.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut adalah rendahnya kemampuan sekolah dalam mengembangkan instrumen penilaian yang tepat. Selain itu juga karena seringnya perubahan peraturan terkait dengan standar penilaian yang menyebabkan kesulitan guru dalam melaksanakan penilaian pembelajaran yang tepat.

Dengan mencermati penyebab tidak tercapainya standar mutu pada sub indikator 4.5.3, maka rekomendasi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

1. Perlu mengadakan sosialisasi terkait peraturan yang terbaru secara rutin dengan program sistematis dan terencana.
2. Perlu mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan penilaian termasuk penentuan kelulusan siswa mengacu pada peraturan yang berlaku.
3. Sekolah meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan instrumen penilaian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Capaian pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan SD Kabupaten Karangasem tahun 2018 dapat dicermati pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11 Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2016		CAPAIAN 2017		CAPAIAN 2018	
Nomor	Standar/Indikator/Subindikator	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		3,77	***	4,31	***	4,39	***
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	*		6,83	*****	5,74	****
5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	6,55	****	2,29	**	5,33	****
5.1.2.	Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang	5,84	****	0,22	*	6,7	*****
5.1.4.	Bersertifikat pendidik	*		7	*****	5,82	****
5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik	4,45	***	4,45	***	4,45	***
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	*		*		*	
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik	5,21	****	5,21	****	5,21	****
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik	*		*		0	*

JENJANG SD KABUPATEN KARANGASEM

5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	*	4,64 ***	6,16 ****
5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	6,54 ****	6,54 ****	6,54 ****
5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan	6,58 ****	6,58 ****	6,58 ****
5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan	*	0 *	6,8 *****
5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara	6,54 ****	3,33 **	6,56 ****
5.2.5.	Bersertifikat pendidik	*	0 *	6,68 *****
5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah	*	0 *	5,24 ****
5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	3,21 **	*	3,23 **
5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik	3,56 **	*	3,58 **
5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik	3,44 **	3,44 **	3,46 **
5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik	2,52 **	3,04 **	2,54 **
5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	3,55 **	3,38 **	3,57 **
5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	3,55 **	3,38 **	3,57 **
5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	*	2,35 **	1,2 *
5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi	*	*	0,03 *
5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat	*	*	0,03 *
5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat	*	*	*
5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi	4,15 ***	4,15 ***	4,18 ***
5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan	2,39 **	2,39 **	2,4 **
5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	*	*	*
5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik	*	*	*
5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik	*	*	*
5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik	*	*	*
5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	*	0 *	0 *
5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium	*	0 *	0 *
5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai	*	0 *	0 *
5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat	*	*	*
5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai	*	*	0,01 *
5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran	0 *	0 *	0 *
5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	*	*	*
5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran	0 *	*	0 *
5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	*	0 *	*
5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	*	*	*
5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik	*	*	*
5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik	*	*	*
5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik	*	*	*
5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	*	0 *	0,84 *
5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan	*	0 *	1,95 *
5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai	*	0 *	1,51 *
5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat	*	*	*
5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai	*	*	1,77 *
5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan	0 *	0 *	0 *
5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan	*	*	0,41 *
5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik	*	*	*
5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik	*	*	*
5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik	*	*	*
5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	*	*	*
5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	*	*	*
5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik	*	*	*

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan ini memiliki 5 indikator yaitu ketersediaan dan kompetensi dari guru, kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah, laboran dan pustakawan. Pada perangkat instrumen tidak ada butir pertanyaan pada standar PTK ini, karena capaian nilainya berasal dari input data dapodik. Selain itu kompetensi guru dan kepala sekolah berasal dari nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Uji Kompetensi Kepala Sekolah (UKKS) Tahun 2015. Berdasarkan capaian hasil dalam Tabel 3.9 dapat dijelaskan hampir semua nilai tenaga kependidikannya (tenaga administrasi, laboran dan pustakawan) rendah, terutama pada ketersediaannya. Karena tidak tersedia maka sudah pasti untuk kompetensi masing-masing akan kosong. Tetapi walaupun tenaga kependidikan (tenaga administrasi, laboran dan pustakawan) di

sekolahnya ada, kompetensi ini juga masih tidak ada nilainya 0 (nol) karena memang datanya belum tersedia.

Ketersediaan kompetensi guru akan dibahas masing-masing sub indikator. Sub 5.1.5 yaitu berkompotensi pedagogik minimal baik nilainya 4,45. Jika nilai ini dikonversi ke skala 100, besarnya adalah $4,45/7 \times 100 = 64$. Ini berarti masih ada 36% guru yang berkompotensi pedagogik minimal baik meskipun secara aturan tahun ini harusnya sudah mencapai 100%. Karena dalam UU No. 14 Tahun 2005 yaitu UU Guru dan Dosen UU Pasal 9 disebutkan bahwa kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Selanjutnya dalam Pasal 82, disebutkan Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya UndangUndang ini. Jadi seharusnya sejak tahun 2016 nilai rapor mutu pada kualifikasi guru ini mencapai nilai 7 (100).

Hasil pencermatan indikator mutu, capaian sub indikator 5.1.5 yang belum mencapai standar akan berdampak pada kedalaman substansi materi pembelajaran yang diberikan guru kurang maksimal. Beberapa penyebab indikator ini belum tercapai adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman tentang kompetensi pedagogik.
2. Paradigma guru dalam pengembangan belum berkembang.
3. Proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Dengan demikian beberapa rekomendasi yang dapat dibuat daerah adalah:

1. Perlu terus mensosialisasikan dan memotivasi guru untuk meningkatkan kualifikasinya.
2. Perlu melaksanakan workshop dan seminar serta mengintensifkan program PKB guru.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem dan lembaga terkait pemerhati pendidikan perlu menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan kepala sekolah dan pengawas Pembina.

Sub indikator 5.1.8 yaitu Berkompotensi sosial minimal baik adalah 0 (nol). Nilai ini jika dikonversi ke dalam skala 100 besarnya $0/7 \times 100 = 0\%$. Ini berarti tidak ada guru berkompotensi sosial minimal baik karena eror. Sub 5.2.10 yaitu Berkompotensi supervisi minimal baik. Jadi sebenarnya data tersebut kurang relevan menggambarkan kompetensi guru dan kepala sekolah di Tahun 2018. Tetapi karena hasilnya murni sebagai akibat ujiannya berbasis komputer, maka data tersebut dianggap masih relevan untuk digunakan.

Adapun resiko jika standar mutu pada kompetensi minimal baik belum tercapai adalah sebagai berikut:

1. Belum dapat dijadikan teladan bagi siswa.
2. Kesulitan dalam mengelola kelas dengan baik.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah:

1. Kurangnya pemahaman tentang kompetensi kepribadian

2. Paradigma guru dalam mengembangkan kompetensi kepribadian masih belum terbentuk.
3. Kurangnya komitmen lembaga penjamin mutu untuk melakukan penyegaran kepada para guru.
4. Proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Berdasarkan penyebab tersebut daerah dapat membuat rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman guru tentang kompetensi pedagogik
2. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran dan paradigma guru dalam pengembangan pembelajaran.
3. Perlu meningkatkan peran pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas serta tindaklanjuthasil supervisi oleh penyelenggara Pendidikan.

Sub indikator kompetensi profesional juga masih tergolong rendah, sehingga masih sangat perlu untuk diperhatikan. Rendahnya hasil akan berdampak pada belum terbentuknya penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam oleh pendidik dalam membimbing siswa belajar. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1. Kurangnya pemahaman tentang kompetensi profesional.
2. Paradigma guru terhadap kompetensi profesional belum terbentuk
3. Proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Berdasarkan penyebab di atas, rekomendasi untuk pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan SD Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

1. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman tentang kompetensi profesional guru.
2. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat mengembangkan paradigma guru terhadap kompetensi profesional.
3. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas.
4. Pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait supaya menindaklanjuti hasil supervisi pendidikan yang dilaksanakan sekolah dan pengawas sekolah sesuai dengan tingkat kewenangannya masing-masing.

Terdapat 11 sub indikator pada indikator kepala sekolah. Sub indikator pertama yaitu dengan kode 5.3.1 adalah standar Tersedia Kepala Tenaga Administrasi sekolah. Seperti halnya guru, Tersedia Kepala Tenaga Administrasi sekolah, ternyata hasil ini baru mencapai angka 0,03(0%). Ini berarti masih ada 100% Tersedia Kepala Tenaga Administrasi sekolah, yang seharusnya sudah mencapai 100%.

Pada sub indikator yang kedua yaitu 5.3.3 Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat capaian hasilnya sebesar 0 (nol). Ini berarti SD di Kabupaten Karangasem tidak memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat yang belum sesuai standar. Hal ini memang sesuai dengan kenyataan yang ada di sekolah dasar. Menurut permendiknas

nomor 24 tahun 2008 kepala tenaga administrasi di SD jika sekolah memiliki lebih dari 6 rombongan belajar.

Pada umumnya penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah:

1. Masih banyak sekolah yang tidak memiliki kepala TAS, karena pertimbangan biaya
2. Lembaga sertifikasi untuk tenaga kependidikan masih terbatas.

Pada sub indikator 5.4 Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan adalah 0 (nol) artinya belum memiliki Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan karena eror. Pada umumnya penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah:

1. Penyelenggara pendidikan selalu pengelola sumber daya manusia kurang memperhatikan tenaga kependidikan.
2. Dana yang dimiliki sekolah terbatas untuk menyediakan kepala tenaga laboratorium.

Berikutnya adalah sub indikator 5.5.6 Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan besaran capaiannya adalah 0,41 (6%), ini berarti masih ada 94% sekolah yang belum Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan. Jika hal ini tidak sesuai akan berdampak pada kemampuan tata kelola perpustakaan yang dilakukan kurang terstruktur dan mendalam. Begitu pula dengan pengalaman akademik masih kurang. Pada umumnya hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia kurang memperhatikan tenaga kependidikan.
2. Dana yang dimiliki sekolah terbatas untuk menyediakan tenaga pustakawan.

Pada sub indikator 5.5.8 yaitu Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik capaiannya adalah 0 (nol) Pada sub indikator 5.5.8 yaitu Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik capaiannya, capaiannya adalah eror.

Pentingnya kepala pustakawan dan tenaga pustakawan ini di sekolah, karena jika ini tidak tercapai akan berdampak pada hal-hal berikut:

1. Tenaga perpustakaan sekolah tidak memiliki pemimpin
2. Program perpustakaan sekolah kurang terencana
3. Pelaksanakan program perpustakaan sekolah kurang optimal
4. Program perpustakaan sekolah tidak terpantau dan terevaluasi
5. Koleksi perpustakaan sekolah kurang
6. Informasi kurang terkelola dengan baik
7. Layanan jasa dan sumber informasi kurang Pada umumnya hal ini disebabkan oleh:
 1. Penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia kurang memperhatikan tenaga kependidikan.
 2. Dana yang dimiliki sekolah terbatas untuk menyediakan kepala tenaga pustakawan dan tenaga pustakawan.

Dari beberapa penyebab tersebut dapat diajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu menganggarkan pengadaan kepala pustakawab dan tenaga pustakawan di sekolah, atau memberikan kelonggaran atauran pembiayaan kepada sekolah yang orang tuanya sanggup memberi bantuan dalam pengadaan pustakawan.
2. Perlu memberikan sosialisasi kepada penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia agar memperhatikan tenaga kependidikan.

G. Analisis Capaian Standar Sarana Prasarana

Analisis pada standar sarana prasarana ini sebenarnya sangat banyak, karena nilai rata-rata capaian standarnya sangat rendah yaitu 3,85. sebagai akibat nilai indikator dan sub indikatornya banyak yang rendah dan ada yang tidak valid. Pada standar sarpras ini yang akan dianalisis adalah sub indikator yang rendah yaitu subindikator 6.3.1 dan 6.3.2 yaitu kondisi ruang pimpinan yang sesuai standar dan kondisi ruang guru yang sesuai standar, sedangkan subindikator yang tidak valid adalah subindikator 6.2.12 dan 6.3.7 yaitu kondisi ruang perpustakaan yang layak pakai dan memiliki ruang sirkulasi yang sesuai standar.

Tabel 3.12 Capaian Standar Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SD
Kabupaten Karangasem Tahun 2018

No	Standar/Indikator/Sub	Capaian 2018	Kinerja	Sasaran					
		Nilai Kategori		M1	M2	M3	M4	SNP	
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3,85 ★★★		2	70	283	0	0	
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4,28 ★★★		0	60	287	8	0	
6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai	n.a		0	0	0	0	0	
6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa	5,98 ★★★★★		47	10	1	6	291	
6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan	6,84 ★★★★★		0	0	1	57	295	
6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa	3,16 ★★		57	280	0	1	17	
6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan	5,88 ★★★★★		2	3	41	241	68	
6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan	2,28 ★★		104	251	0	0	0	
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	2,28 ★★		91	264	0	0	0	
6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar	5,52 ★★★★★		0	6	110	230	9	
6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar	0,02 ★		353	1	1	0	0	
6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar	2,07 ★★		135	187	32	1	0	
6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar	0,01 ★		355	0	0	0	0	
6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai	5,20 ★★★★★		3	5	231	60	56	
6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai	0,01 ★		354	0	1	0	0	
6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai	0,00 ★		355	0	0	0	0	
6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai	6,88 ★★★★★		0	0	0	30	264	
6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	1,93 ★		224	129	2	0	0	
6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar	0,79 ★		279	73	3	0	0	

PETA MUTU PENDIDIKAN

6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar	0,44	★		352	3	0	0	0
6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar	0,52	★		294	61	0	0	0
6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar	0,06	★		348	7	0	0	0
6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar	3,56	★★		33	191	60	71	0
6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar	0,43	★		342	13	0	0	0
6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar	n.a			0	0	0	0	0
6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak	6,31	★★★★		0	24	17	94	218
6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai	4,92	★★★		0	85	86	107	75
6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai	1,10	★		299	0	0	0	56
6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai	1,73	★		217	50	61	27	0
6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai	2,17	★★		258	21	28	31	17
6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai	0,86	★		271	80	0	0	4
6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar	3,82	★★★		20	146	139	1	49
6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai	n.a			0	0	0	0	0
6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai	6,79	★★★★★		0	4	10	38	301

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Diambilnya sub indikator 6.3.1 yaitu kondisi ruang pimpinan yang sesuai standar adalah karena sub indikator ini merupakan salah satu indikator pendidikan dalam profil pendidikan daerah yang dikembangkan dari misi Kemdikbud yaitu mewujudkan pembelajaran yang bermutu pada butir indikator pendidikan nomor 12 yaitu prosentase ruang kelas baik. Setelah dicek pada tabel konversi excel didapat bahwa data ini berasal dari 5 butir pertanyaan dapodik yaitu jumlah ruang kelas, kursi dan meja dalam kondisi baik, serta terdapat fasilitas pencahayaan, dan terdapat pintu ruangan yang dapat dikunci dengan baik. Adapun deskripsi dari sub indikator ini adalah:

Capaian pemenuhannya pada rapor mutu adalah 5,67 (81%). Hal ini berarti SD di Kabupaten Karangasem sudah memiliki ruang kelas yang layak pakai sebesar 81%. Masih ada 19% ruang kelas yang tidak layak pakai. Ruang kelas layak pakai ini merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Dengan demikian pemenuhan ruang kelas yang layak pakai harus menjadi prioritas pada satuan pendidikan oleh pemerintah daerah.

H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan memiliki 4 indikator, di antara 4 indikator ini, capaian nilai yang terendah adalah pada indikator ke-3. Rendahnya nilai kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan ini disebabkan oleh sub indikator yang terendah yaitu pada sub indikator 7.3.2 yaitu Berjiwa Kepemimpinan.

**Tabel 3.13 Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SD
Kabupaten Karangasem Tahun 2018**

07.00 Standar Pengelolaan Pendidikan		6,05
07.01 Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan		6,62
07.01.01	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan	6,76
07.01.02	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan	6,62
07.01.03	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah	6,48
07.02 Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan		6,38
07.02.01	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap	6,27
07.02.02	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan	6,8
07.02.03	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan	6,15
07.02.04	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri	6,54
07.02.05	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan	6
07.02.06	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran	6,55
07.03 Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan		2,07
07.03.01	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik	n.a
07.03.02	Berjiwa kepemimpinan	5,71
07.03.03	Mengembangkan sekolah dengan baik	0
07.03.04	Mengelola sumber daya dengan baik	6,75
07.03.05	Berjiwa kewirausahaan	0
07.03.06	Melakukan supervisi dengan baik	0
07.04 Sekolah mengelola sistem informasi manajemen		6,47
07.04.01	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan	6,47

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Setelah ditelusuri pada tabel konversi excel, data ini didapat dari 2 butir pertanyaan pada instrumen PMP. Adapun bentuk pertanyaan adalah:

16. Program penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh sekolah anda

- ☐ Promosi jabatan atau tugas
- ☐ Penguatan kompetensi dan kinerja
- ☐ Beasiswa melanjutkan pendidikan
- ☐ Insentif bonus atau kenaikan kerja
- ☐ Liburan atau istirahat kerja
- ☐ Piagam penghargaan
- ☐ Penghargaan informal (pujian, senyum, makan bersama dan lainnya)
- ☐ Bentuk hadiah lainnya

Butir pertanyaan tersebut terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Untuk dapat menjawab dengan baik, dapat mencermati pada pedoman pengisiannya.

16. Program penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh sekolah berdasarkan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi:

- Kesesuaian penugasan dengan latar belakang pendidikan.
- Keseimbangan beban kerja.
- Keaktifan dalam pelaksanaan tugas.
- Pencapaian prestasi.
- Keikutsertaan dalam berbagai lomba.

Diisi mengacu pada:

- a) Penugasan dari kepala sekolah.
- b) Presensi (daftar hadir) pendidik dan tenaga kependidikan.
- c) Piagam, sertifikat, dan penghargaan lainnya.
- d) Hasil penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

Sumber: Perangkat instrumen Pemetaan jenjang SD (2018: 36)

Bisa jadi kepala sekolah yang menjawab pertanyaan ini akan mencentang semua pilihan, tetapi jika pertanyaan ini diberikan kepada pengawas atau guru, belum tentu mereka mencentang semua. Contoh pada guru, secara riil mereka akan mencentang hanya pada kolom yang mereka alami saja. Dengan mengetahui kondisi yang seharusnya inilah kedepannya kepala sekolah perlu menerapkan pemberian penghargaan kepada guru dalam bentuk-bentuk seperti yang tertera pada butir pertanyaan 16.

Kepala sekolah memiliki jiwa kepemimpinan artinya dapat membangun tujuan bersama di sekolah, melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah serta penyelenggara sekolah; menjalin kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan komite sekolah; menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat. Adapun resiko jika standar mutu ini tidak tercapai adalah pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan sekolah akan terhambat. Secara umum penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah karena kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah belum memenuhi. Dengan demikian rekomendasi yang diberikan adalah perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah.

I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan

Capaian pemenuhan standar pembiayaan SD Kabupaten Karangasem tahun 2018 selengkapya dapat dicermati pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.13 Capaian Standar Pembiayaan Pendidikan Jenjang SD
Kabupaten Karangasem Tahun 2018**

8 Standar Pembiayaan		6.01
8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6.86
8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu	6.8
8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas	6.8
8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	7
8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.9
8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan	6.9
8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4.26
8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya	0.11
8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana	6.08
8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	6.59

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Butir pertanyaan untuk standar pembiayaan tidak ada secara khusus pada perangkat instrumen PMP. Tetapi ada 5 butir pertanyaan untuk pembiayaan yang dimasukkan ke dalam standar pengelolaan yaitu untuk sub indikator: 8.2.1; 8.3.2 dan 8.3.3.

Berdasarkan hasil pada Tabel 3.11 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 3 indikator pada standar pembiayaan yang paling rendah adalah indikator 8.3 terutama pada subindikator 8.3.1. Pada subindikator 8.3.1 capaiannya hanya 0,11 (1,71) ini berarti hanya 1,71% SD di Kabupaten Karangasem yang mampu mengatur alokasi dana bantuan pemerintah sesuai standar. Apakah demikian adanya? Data pada subindikator 8.3.1 bersumber dari dapodik. Kemungkinan terjadinya kesalahan input data oleh operator sekolah atau sumber data yang ada di sekolah tidak lengkap. Pada kenyataannya semua SD di Karangasem menerima dana BOS APBN pada tahun 2018 dan tidak ada permasalahan terkait dengan pengelolaan dana dimaksud. Sekolah Dasar di Kabupaten Karangasem semuanya memiliki bukti fisik laporan yang sesuai ketentuan yaitu, terdapat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dimana antara pedoman pengelolaan keuangan dengan rincian komponen-komponen biaya operasional yang telah dibelanjakan selama satu tahun sesuai standar dengan disertai bukti pelaporan.

Pada nomor 6 komponen pengelolaan yaitu butir nomor 9 ditanyakan apakah sekolah melaksanakan sosialisasi biaya operasional kepada pemangku kepentingan. Adapun pemangku kepentingan yang dimaksud adalah guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua siswa dan komite. Laporan dapat diakses oleh pemangku kepentingan melalui: media internet seperti website atau email, majalah sekolah, surat edaran, rapat komite dan lainnya.

Belum tercapainya subindikator tersebut secara optimal akan berdampak pada hal-hal berikut:

1. Rentan terhadap tuduhan tindak pidana KKN kepada bendahara dan kepala sekolah oleh pemangku kepentingan.
2. Proses pemantauan, supervisi, pengawasan dan tindak lanjut pengawasan akan sulit dilakukan.
3. Sekolah terkendala dalam membangun kemitraan dengan lembaga lain.

Belum tercapainya sub indikator tersebut secara optimal kemungkinan disebabkan oleh sistem informasi manajemen tidak terkelola dengan baik, kepala sekolah tidak mampu menjalankan tugas kepemimpinan dengan baik serta hubungan antara sekolah dan pemangku kepentingan tidak harmonis.

Berdasarkan penyebab tersebut dapat diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang dikelola dengan baik.
2. Perlu mengembangkan program yang dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam hal kepemimpinan.
3. Perlu pengalokasian anggaran khusus untuk meningkatkan kinerja Operator Sekolah maupun Operator Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem.

**BAB
IV**

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis rapor mutu pendidikan SD Kabupaten Karangasem Tahun 2018 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Sekolah Dasar Kabupaten Karangasem pada tahun 2018 yang mengirim data PMP sebanyak 355 sekolah dari 356 sekolah yang terdaftar. Sekolah yang tidak mengisi data PMP adalah SD Saraswati Amlapura karena sudah tidak beroperasi. Capaian pemenuhan SNP jenjang pendidikan SD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Tahun 2018 adalah 5,66 pada katagori menuju SNP level 4. Sekolah yang sudah memenuhi SNP sebanyak 37 SD, menuju SNP 4 sebanyak 226 SD, menuju SNP 3 sebanyak 79 SD, menuju SNP 2 sebanyak 13 SD dan hanya 1 SD yang menuju SNP 1.
2. Untuk jenjang pendidikan SD capaian pemenuhan SNP yang paling baik adalah pada standar proses pada katagori menuju SNP 4 dengan skor 6,64. Pada standar proses banyak sekolah sudah memenuhi SNP sebanyak 187 SD. Sebanyak 167 SD sudah memenuhi SNP pada katagori menuju SNP 4 dan hanya 1 sekolah pada katagori menuju SNP 2. Hal ini menunjukkan pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru-guru SD Kabupaten Karangasem secara sudah memenuhi SNP. Capaian yang terbaik berikutnya pada pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan. Proses pembelajaran bermutu yang dilaksanakan di sekolah, menunjang terpenuhinya SKL yang memenuhi standar. Sebanyak 56 SD sudah memenuhi SNP pada SKL, 297 SD pada katagori menuju SNP 4 dan masing-masing 1 SD menuju SNP 1 dan menuju SNP 3. Capaian terendah pada Standar Sarana Prasarana yaitu 3,85 dengan katagori menuju SNP 3. Juga Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang hanya mencapai 4,39 pada katagori menuju SNP 3. Berdasarkan kondisi tersebut dapat digambarkan bahwa walaupun dengan keterbatasan pada pemenuhan sarana prasarana dan PTK, SD Kabupaten

Karangasem dapat memenuhi standar proses dan pencapaian SKL lebih baik. PTK SD Kabupaten Karangasem mempunyai kemampuan mengelola sumber daya secara efektif sehingga dapat menyelenggarakan proses pembelajaran bermutu untuk mencapai SKL yang menuju SNP sesuai dengan *tagline* Karangasem the spirit of Bali.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem perlu memberikan prioritas pada pemenuhan sarana prasarana serta pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dasar agar memenuhi SNP. Pemenuhan SNP pada kedua standar akan mendorong pemenuhan pada standar lainnya untuk mewujudkan pendidikan SD yang berkualitas dan memenuhi SNP.
4. LPMP mempunyai peranan yang sangat penting mendorong satuan pendidikan maupun pemerintah daerah mengimplementasikan SPMP dengan baik dan berkelanjutan.

B. Rekomendasi

Mengacu pada hasil analisis rapor mutu pendidikan SD Kabupaten Karangasem tahun 2018 direkomendasikan agar:

1. Semua pemangku kepentingan pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan SD Kabupaten Karangasem harus memiliki komitmen yang sama dalam pemenuhan standar nasional pendidikan agar dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan memenuhi SNP.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Satgas PMP perlu mengkaji kembali instrumen PMP dan sistem pengolahan data mutu pendidikan. Demikian juga dengan integrasi data Dapodik maupun data lain sebagai sumber data mutu pendidikan.
3. Rekomendasi Peningkatan Mutu Standar Kompetensi Lulusan
 - a. Kepala sekolah perlu merancang kegiatan yang memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan potensi diri sesuai minat dan bakatnya seperti studi banding, kunjungan museum, studi lapangan.
4. Rekomendasi Peningkatan Mutu Standar Isi
 - a. Tim Pengembang Kurikulum Sekolah perlu melibatkan seluruh *stakeholders* seperti konselor, komite sekolah, perwakilan orang tua, tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan dan narasumber dalam proses review kurikulum sekolah. Semua dokumen dan proses keterlibatan *stakeholders* diadministrasikan dengan baik.
 - b. Tim Pengembang Kurikulum Sekolah perlu mengembangkan/mereview kurikulum sekolah sesuai tahapan pengembangan kurikulum berupa analisis, penyusunan, penetapan dan pengesahan.
5. Rekomendasi Peningkatan Mutu Standar Proses
 - a. Pengawas dan kepala sekolah perlu melakukan supervisi secara efektif dan

- berkelanjutan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan ekstrakurikuler.
- b. Sekolah perlu menyediakan media pendukung pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran.
6. Rekomendasi Peningkatan Mutu Standar Penilaian
 - a. Sekolah perlu menyusun SOP tentang mekanisme dan pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh guru dan satuan pendidikan untuk dipedomani oleh guru dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran.
 - b. Sekolah perlu merancang instrumen penilaian yang terstandarisasi pada aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk digunakan guru dalam penilaian.
 7. Rekomendasi Peningkatan Mutu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - a. Pemerintah Daerah perlu melakukan pemetaan kualifikasi dan kompetensi guru dengan memperhatikan kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diampu di Kabupaten Karangasem. Data hasil pemetaan digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan dan pemerataan kebutuhan pendidik tenaga kependidikan SD Kabupaten Karangasem yang memenuhi SNP.
 - b. Pemerintah daerah perlu melaksanakan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan dan kewenangan berdasarkan hasil pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik diutamakan pemenuhan guru kelas SD di masing-masing sekolah. Tenaga kependidikan diprioritaskan pada pemenuhan pustakawan, tenaga administrasi dan operator yang memenuhi SNP.
 - c. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kinerja guru melalui proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas serta menindak lanjuti hasil supervisi pengawas sekolah.
 - d. Kepala sekolah perlu menyusun program peningkatan kompetensi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran (misalnya pelatihan, pendampingan, supervisi, studi banding, belajar mandiri, lesson study, dan sebagainya) yang berbasis pembelajaran HOTS. Pelaksanaan dapat secara mandiri maupun melalui fasilitasi pemerintah.
 8. Rekomendasi Peningkatan Mutu Standar Sarana dan Prasarana
 - a. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pemenuhan ruang kelas SD yang mengacu pada kebutuhan setiap SD di Kabupaten Karangasem.
 - b. Pemerintah daerah melalui BPKAD perlu menerbitkan surat keputusan terkait alih fungsi ruangan/bangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan lain di sekolah sesuai usulan sekolah. Pemanfaatan rumah jabatan kepala sekolah sebagai ruang administrasi misalnya.
 - c. Kepala sekolah perlu meningkatkan program pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai salah satu sumber belajar.
 - d. Kepala sekolah perlu mendorong satuan pendidikan untuk menjadikan lingkungan sekolah aman, nyaman, ramah anak dan penumbuhan karakter dan literasi melalui lomba-lomba kinerja sekolah.

9. Rekomendasi Peningkatan Mutu Standar Pengelolaan

- a. Pemerintah daerah perlu mengembangkan program untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah agar memenuhi SNP khususnya pada kemampuan pengelolaan sumber daya sekolah yang bertanggungjawab dan akuntabel.
- b. Kepala sekolah perlu mengembangkan sistem informasi pengelolaan sekolah yang memenuhi SNP.

10. Rekomendasi Peningkatan Mutu Standar Pembiayaan

- a. Pemerintah daerah perlu melaksanakan workshop/IHT untuk meningkatkan kemampuan bendahara BOS dan kepala sekolah dalam pengelolaan keuangan sekolah dan bantuan pemerintah lainnya.
- b. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Denim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung : Pustaka Setia
- Djaali. 2014. Psikologi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara
- Kemdikbud. 2017. Indikator Mutu dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
- Satori.2016. Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Jakarta : Alfabeta
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>
- <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id>
- <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>
- <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/>
- <http://statistik.data.kemdikbud.go.id> <http://npd.kemdikbud.go.id/>